

## ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI RIAU

Sri Maryanti & Hardi

Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning  
ssrimaryanti@yahoo.com & hardi@unilak.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah menganalisis Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Menganalisis Indeks Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Memberikan saran untuk kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, baik untuk daerah maupun untuk Provinsi dalam hal ini melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Perlu adanya stimulasi yang mampu mendorong pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan khususnya penyediaan lapangan kerja, peningkatan daya beli dan mengurangi tingkat pengangguran. Perlu adanya pola pengaturan untuk pembangunan ketenagakerjaan agar dapat berkembang menjadi lebih baik sehingga mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Agar adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu melalui: Tahap pertama untuk menganalisis pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Riau dilakukan dengan menganalisa bobot TPAK dan elastisitas permintaan tenaga kerja. Tahap berikutnya menganalisis indeks pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan alat analisis sub indikator melalui sub indikator utama ke n seperti kebutuhan dan perencanaan tenaga kerja. Adapun rencana kerja yang diusulkan dalam penelitian ini adalah: Agar pemerintah di Provinsi Riau memiliki suatu program untuk memajukan pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Riau. Agar pemerintah di Provinsi Riau mampu memberikan stimulus untuk dapat meningkatkan peran tiap sektor khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja

**Kata Kunci:** Pembangunan ketenagakerjaan, indeks tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja

### LATAR BELAKANG PENELITIAN

Provinsi Riau memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian wilayah dan nasional, hal ini disebabkan karena potensi Sumber Daya Alam di Riau menjadi potensi unggulan antara lain pertambangan, pertanian, kehutanan, kelautan, industri dan jasa. Perkembangan perekonomian di Riau membuka peluang bagi para pencari kerja sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Selama periode 2011-2015 jumlah angkatan kerja terus meningkat sebesar 16,15% hal ini berarti semakin meningkatnya jumlah orang yang bekerja periode 2011-2015 sebesar 14,44% sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 46,65% seperti yang terlihat pada tabel 1.

Dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja selama kurun waktu 2011-2015 di Riau menunjukkan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk Riau yang nekerja atau sedang mencari pekerjaan, namun bagaimana dengan lapangan kerja yang tersedia saat ini di Riau?, apakah sudah mampu memenuhi target atau sudah seimbangkah antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja. Jika lapangan kerja tidak mampu menampung pencari kerja yang tiap tahunnya akan terus bertambah

maka akan menimbulkan pengangguran dai semua sektor. Lalu bagaimana dengan pembangunan ketenagakerjaan saat ini?.

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut dibutuhkan perhitungan indeks pembangunan ketenagakerjaan hal ini bertujuan sebagai alat ukur yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di setiap daerah, provinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu penyusunan indeks pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di bidang pembangunan ketenagakerjaan serta sebagai bahan penyusunan rencan pembangunan ketenagakerjaan ke depan.

Hasil evaluasi tersebut juga perlu bagi Pemerintah Pusat sebagaibahan pembinaan dan pemberian bantuan ke pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ketenagakerjaan pada umumnya serta bidang pelatihan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

**Tabel 1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Tahun 2011 s.d 2015**

Jenis Kegiatan Utama Angkatan Kerja (AK)	Tahun				
	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)
1. AK (Orang)	2.560.402	2.506.776	2.829.198	2.801.165	2.974.014
Bekerja	2.424.180	2.399.002	2.712.245	2.661.327	2.774.245
Menganggur	136.222	107.774	116.963	139.838	199.769
2. Tingkat Partisipasi AK(%)	66,38	62,90	69,3	66,88	64,22
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,30	4,13	4,99	6,72
4. Bukan AK (Orang)	1.296.743	1.478.481	1.253.330	1.386.897	1.345.780
5. Pekerja Tidak Penuh	882.404	1.001.104	1.078.180	924.840	1.018.883
Setengah Penganggur (Orang)	400.389	380.893	238.955	210.749	263.123
Paruh Waktu (Orang)	482.015	620.211	839.225	714.091	755.760

Sumber: BPS.go.id (2015)

Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) ini merupakan implementasi dari Kepmenakertrans nomor 13 Tahun 2003 tentang indikator indeks ketenagakerjaan yang dibagi menjadi 9 indikator utama indeks pembangunan ketenagakerjaan yaitu perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Selama kurun waktu 2011 s.d 2014 angka indeks pembangunan ketenagakerjaan secara nasional berfluktuatif namun cenderung meningkat yakni dari 49,92 untuk tahun 2011, untuk tahun 2012 meningkat menjadi 54,15 sedangkan untuk tahun 2013 IPK berada pada angka 56,31 dan tahun 2014 IPK berada pada angka 55,50. Peningkatan IPK nasional dipicu oleh kenaikan nilai delapan indikator ketenagakerjaan utama yaitu penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas kerja, hubungan industrial, perencanaan tenaga kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan merupakan alat penilaian dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam proses pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing pemerintahan daerah. Lalu bagaimana dengan Provinsi Riau? apakah IPK Riau sudah mampu menggambarkan pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Riau.

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja dibagi dalam beberapa kelompok yaitu (Putri, 2015)

- a) Penduduk, semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)
- b) Usia Kerja, usia kerja di Indonesia saat ini menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun dan tanpa batas maksimal usia kerja (Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)
- c) Bukan Angkatan Kerja, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. (Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)
- d) Angkatan Kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Angkatan Kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilaksanakan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. (Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)
- e) Bekerja, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan apaling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kriteria satu jam dengan defenisi bekerja dan pengangguran yang digunakan, dimana pengangguran adalah situasi dari ketiadaan pekerja secara total, sehingga jika batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah defenisi pengangguran yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. (Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)
- f) Penganggur, penganggur adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelum dikategorikan bukan angkatan kerja, yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelum dikategorikan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep/ defenisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka (*open unemployment*) ((Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi, 2011-2014 dalam Putri, 2015)

### Perencanaan Tenaga Kerja

Menurut Reichter dalam Hasyim (2003;93), perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara reguler, dan analisa situasi dan trend untuk masa kini dan masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja termasuk faktor-faktor penyebab adanya ketidakseimbangan dan penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan program aksi, sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan dan sisi kebutuhan. Dari sisi persediaan lebih banyak membahas mengenai jumlah dan

mutu tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja cenderung membicarakan persoalan yang terkait dengan calon tenaga kerja atau orang-orang yang akan menjadi pendatang baru pada kelompok angkatan kerja. Perencanaan tenaga kerja dari sisi kebutuhan merupakan *derived demand* dimana kebutuhan tenaga kerja baru akan ada, jika ada permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. (Syahrudin, 2002).

Sikula dalam Hasibuan (2009) mengemukakan bahwa: "Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi".

Yoder dalam Hasibuan (2009) mendefinisikan bahwa: "Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat".

Perencanaan tenaga kerja harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan tenaga kerja adalah menghubungkan sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat produksi dari perusahaan penyedia (suplier) maupun pesaing dapat juga berpengaruh. Meramalkan sumber daya manusia, perlu memperhitungkan perubahan teknologi, kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia (tenaga kerja) memberikan petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. (Tambunan, 2011)

Syarat-syarat perencanaan tenaga kerja, menurut Alatas dkk (2011) ; 1) Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya, 2) Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang calon tenaga kerja, 3) Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi dan situasi persediaan tenaga kerja, 4) Harus mampu membaca situasi tenaga kerja masa kini dan masa mendatang, 5) Mampu memperkirakan peningkatan tenaga kerja dan teknologi masa depan, dan 6) Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah

### **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dan dinyatakan dalam bentuk suatu indeks komposit yang mencakup Sembilan bidang pembangunan ketenagakerjaan yang dianggap sangat mendasar atau indicator utama. (Putri 2015).

Indeks Komposit yang mencakup Sembilan bidang pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Pusat Perencanaan Tenaga Kerja 2011-2014 dalam (Putri.2015).

1. Perencanaan tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar

- dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berseimbangan.
2. Penduduk dan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
  3. Kesempatan kerja, besarnya kesediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu saat dari kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja (Sudarsono, 2008) dalam Sri (2013).
  4. Pelatihan dan kompetensi, pelatihan dan kompetensi kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, disiplin, etos dan sikap kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  5. Produktivitas Tenaga kerja, merupakan hasil yang diciptakan oleh tenaga kerja baik berupa barang maupun jasa.
  6. Hubungan industrial, suatu system hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsure pengusaha, pekerja atau buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
  7. Kondisi Lingkungan Kerja, dimana situasi atau suatu kondisi yang ada pada seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja seseorang.
  8. Pengupahan dan Kesejahteraan Kerja, upah minimum yang diberikan oleh suatu perusahaan oleh tenaga kerja terhadap kebutuhan hidup layak. Besaran upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum mengacu pada standart kebutuhan hidup yang ditempatkan pada skala minimal, yaitu dengan mempertimbangkan KHL, Kondisi pasar kerja, produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu.
  9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pemusaha dan tenaga kerja.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, mengingat Riau merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik yang berasal dari dalam wilayah Riau ataupun yang berasal dari Riau. Disamping itu Riau mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga perlu adanya penataan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk menganalisis masalah ketenagakerjaan dalam penelitian ini digunakan sekunder yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik

(BPS) dan Instansi Pemerintah terkait lainnya. Data publikasi BPS terutama adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011s.d 2014. Selain itu, digunakan pula data hasil penelitian yang ada, terutama hasil temuan dari para ahli dibidang ketenagakerjaan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu berupa buku-buku yang memuat data-data tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Untuk kepentingan penelitian ini diperlukan data yang relevan dengan permasalahannya. Karena itu data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan berdasarkan teknik dokumentasi. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan dengan teknik observasi. Dalam penelitian ini dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain: 1) Metode Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dari berbagai kegiatan yang diobservasi, dan 2) Metode dokumentasi, adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian baik dari instansi terkait maupun media cetak.

### **Analisis Data**

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Untuk analisa deskriptif kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan menggambarkan tentang pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Riau dengan menghubungkan dengan data indkes pembangunan ketenagakerjaan untuk wilayah Provinsi Riau.
- b) Untuk menganalisis indeks pembangunanan ketenagakerjaan dilakukan dengan metode kualitatif dan juga kuantitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan angka yang diperoleh.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Riau**

Berdasarkan tabel 1.1 selama kurun waktu 2011-2015 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 16,15% dimana jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 14,44% sedangkan jumlah pengangguran juga mengalami peningkatan sebesar 46,65%. Untuk tahun 2014-2015 jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 6,17% dibandingkan tahun 2014, hal ini diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang bertambah sebesar 4,2% namun disisi lain tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan sebesar 4,99%. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran diiringi juga dengan semakin menurunnya TPAK selama kurun waktu 2011-2015 yakni dari 66,38% tahun 2011 turun menjadi 64,32% tahun 2015 dan hal ini juga berkorelasi dengan TPT yang juga cenderung meningkat dari 5,32% tahun 2011 meningkat menjadi 6,72% tahun 2015. Hal ini berarti semakin banyaknya jumlah para pencari kerja di provinsi Riau yang belum diiringi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia di Riau.

Jika dilihat dari persentase daya serap tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang ada maka dapat dilihat sector yang dominan menyerap tenaga kerja selama kurun waktu 2011-2015 adalah sector pertanian dan sector perdagangan juga sector jasa, hal ini membuktikan bahwa kedua sector tersebut

masih menjadi andalan bagi penduduk, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki keahlian atau memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memasuki dunia kerja. Sektor pertanian masih dianggap sebagai sector yang paling dominan disebabkan di Riau masih terbuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha pada sector ini. Sedangkan untuk sector perdagangan masih menjadi pilihan karena pada sector ini dipenuhi oleh para pendatang yang masuk ke Riau untuk membuka lapangan usaha. Untuk sector jasa juga termasuk masih banyak diminati karena pada sector ini memberikan peluang untuk berkembang terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi sehingga sector jasa dinilai masih memberikan harapan.

**Tabel 2**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015 (%)**

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	44,80	44,70	46,31	42,41	46,09
Pertambangan dan Penggalian	1,55	1,90	1,62	1,73	1,32
Industri	6,01	6,10	4,79	5,51	4,90
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,42	0,30	0,23	0,31	0,12
Konstruksi	5,15	5,10	4,71	5,54	4,84
Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	20,25	20,50	20,78	20,50	16,04
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,93	4,00	3,55	3,79	3,85
Lembaga Keuangan	2,32	2,90	2,93	2,29	2,98
Jasa Kemasyarakatan	15,55	14,30	15,07	17,91	19,85
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS.go.id (2015)

Daya serap tenaga kerja dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penduduk karena pendidikan penduduk sebuah bangsa sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tersebut, oleh karena itu pemerintah saat ini sudah menggalakkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini memang sangat tepat sekali karena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah dimulai pada akhir Desember 2015 mau tidak mau masyarakat harus siap untuk menghadapi MEA, baik tenaga kerja maupun produk yang dihasilkan.

Selama kurun waktu 2011-2015 persentase penduduk yang bekerja lebih banyak memiliki latar belakang pendidikan SD kebawah, SMP dan SMA walaupun kecenderungan tersebut berfluktuatif. Untuk pendidikan Diploma mengalami penurunan karena penduduk lebih banyak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas maka dari itu jumlah penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan Universitas tiap tahunnya cenderung meningkat walau angkanya tidak sebesar SD, SMP dan SMA. Semakin menurunnya persentase penduduk bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan juga disebabkan oleh semakin banyaknya minat penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan akan memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Menurut BPS status pekerjaan utama seseorang dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, hal ini didasarkan oleh semakin tinggi pendidikan seseorang maka peluang orang tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang lebih cenderung semakin terbuka lebar karena tiap pekerjaan menuntut keahlian dan kemampuan serta pola pikir dari pekerja tersebut.

**Tabel 3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Provinsi Riau menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2011 s.d 2015 (%)**

Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan	2011	2012	2013	2014	2015
SD Kebawah	39,05	38,06	39,47	40,51	37,17
Sekolah Menengah Pertama	21,53	21,35	20,71	19,22	19,09
Sekolah Menengah Atas	20,65	21,85	20,44	22,03	23,06
Sekolah Menengah Kejuruan	9,71	8,93	8,5	8,82	8,89
Diploma I/II/III	3,62	3,29	3,38	2,63	2,84
Universitas	5,43	6,52	7,5	6,79	8,95
Total	100	100	100	100	100

Sumber : BPS.go.id (2015)

Tahun 2011 s.d 2015 penduduk lebih banyak bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, hal ini disebabkan status pekerjaan ini dinilai lebih mudah untuk memasukinya seperti status pekerjaan karyawan/pegawai dinilai sudah menjamin kehidupan seseorang tiap bulannya sudah pasti memperoleh penghasilan. Status pekerjaan yang memiliki persentase tertinggi adalah berusaha sendiri, hal ini sekarang ini semakin banyaknya penduduk yang merasa perlu jaminan hari tua karena mereka merupakan pekerja swasta disamping itu banyaknya penduduk yang berusaha sendiri disebabkan oleh sulitnya memperoleh pekerjaan. Berikutnya status pekerjaan yang merupakan pekerja keluarga, dimana penduduk yang telah memiliki usaha dimana anggota keluarganya juga merupakan pekerja bagi usaha mereka sendiri karena dinilai lebih dipercaya dalam menjalankan usaha tersebut. Terakhir adalah status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dimana kecenderungannya semakin menurun tiap tahunnya hal ini disebabkan mereka yang memiliki berusaha menginginkan pekerja tetap untuk menjalankan usaha mereka agar usaha tersebut bisa terus berjalan.

**Tabel 4**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015 (%)**

Status Pekerjaan Utama	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Berusaha Sendiri	22,11	20,72	21,63	20,90	18,63
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	13,94	14,17	11,00	11,71	11,50
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	5,07	5,85	4,40	5,20	4,19
Buruh/Karyawan/Pegawai	37,39	37,80	41,08	41,84	44,15
Pekerja Bebas di Pertanian	5,03	3,91	5,49	3,73	5,68
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1,43	2,40	1,76	1,99	2,79
Pekerja Keluarga	15,03	15,15	14,65	14,62	13,06
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS.go.id (2015)

### **Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau**

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga ditunjang oleh Pendapatan daerah atau PDRB, hal ini dinilai sangat perlu karena tanpa adanya dana maka produktivitas sulit untuk ditingkatkan. Selama kurun waktu 2011-2015 jumlah PDRB mengalami peningkatan hal ini merupakan kemajuan dari sisi ekonomi karena penerimaan daerah mengalami peningkatan, seiring dengan itu jumlah tenaga kerja juga bertambah sehingga produktivitas penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 34% selama tahun 2011-2015 artinya tenaga kerja yang ada di Riau mampu membangun Provinsi Riau melalui kemampuan dan produktivitas mereka.

**Tabel 5**  
**Produktivitas Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015**

Item	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PDRB(Miliar RP)	102.666	106.309	109.073	<b>109.830</b>	158.260
Tenaga Kerja (orang)	2.424.180	2.399.002	2.481.361	2.661.327	2.774.245
Produktivitas(RP/Org)	42.350.801	44.313.730	43.956.980	41.268.858	57.046.151

Sumber : BPS PDRB 2011-2015 Sakernas 2015 diolah Pusdatinaker

Pembangunan ketenagakerjaan juga dapat diketahui dari upah yang diterima oleh pekerja per bulannya karena upah yang diterima oleh pekerja menunjukkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dari pekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.

Dari tahun 2011-2015 upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau terus mengalami perubahan bahkan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang ditetapkan berada diatas KHL (Komponen Hidup Layak). Seperti untuk tahun 2014 UMP yang ditetapkan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014 sebesar Rp 1.700.000 per bulan sedangkan KHL saat itu Rp 1.654.224 per bulan, sedangkan untuk tahun 2015 UMP Riau sebesar Rp 1.878.000 per bulan dan KHL tahun 2015 Rp 1.872.000 per bulan. Hal ini membuktikan perhatian pemerintah sudah cukup untuk para pekerja namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak para pekerja yang menerima upah/pendapatan dibawah UMP hal ini disebabkan juga dari status pekerjaan utama pekerja seperti buru, akan tetapi yang menerima upah/pendapatan diatas UMP yaitu Rp 2.000.000,- juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2011-2015 yaitu sebesar 114,30% ini termasuk jumlah yang cukup besar, akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau hal ini tentunya masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Riau.

**Tabel 6**  
**Jumlah Pekerja Yang Menerima Upah/Pendapatan Bersih Sebulan Di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015 (Org)**

Upah/Gaji/Pendapatan Bersih sebulan (org)	Jumlah Pekerja/ Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
< Rp 500.000	92.674	99.017	59.488	97.059	143.101
Rp 500.000 – Rp 999.999	276.715	253.879	214.685	242.217	256.301
Rp 1.000.000 – Rp 1.499.999	318.326	312.372	244.051	257.409	291.745
Rp 1.500.000 – Rp 1.999.999	180.797	208.222	250.106	217.523	254.127
>Rp 2.000.000	240.041	277.158	418.034	404.784	514.409

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2011s.d 2015, diolah Pusdatinaker

Pembangunan bidang ketenagakerjaan juga ditunjukkan dari jumlah kesempatan kerja yang ada di Riau yang terdiri dari jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah terus mengalami penurunan dari tahun 2011-2015 sebesar 1,17% yang juga diringi oleh berkurangnya lowongan kerja terdaftar sebesar 91,11% dan jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja pada kurun waktu yang sama juga mengalami perubahan yang cukup significance terutama pada tahun 2014 hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja usia 15 tahun keatas dengan pendidikan di bawah SD sedangkan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja adalah tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan universitas namun jumlahnya sangat sedikit sekali yaitu 6,79% tahun 2014. Ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah mengingat semakin sempitnya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja oleh karena itu semakin seringnya pemerintah daerah membuka bursa lapangan kerja untuk mengatasi hal tersebut namun tidak terlalu membantu.

**Tabel 7**  
**Jumlah Kesempatan Kerja Di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015 (Org)**

	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pencari Kerja Terdaftar	21.854	4.512	254	17.563	21.599
Lowongan Kerja Terdaftar	57.279	3.589	225	3.699	5.088
Penempatan / Pemenuhan Tenaga Kerja	2.019	2.501	50	253	404

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2011-2015, diolah Pusdatinaker

### **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau**

Sejak Otonomi Daerah (OTODA) urusan ketenagakerjaan di daerah seluruhnya di serahkan kepada pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Namun dengan berbagai alasan, seperti prioritas kebutuhan daerah, keterbatasan anggaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak semua program ketenagakerjaan dilaksanakan secara utuh. Ketidaktepatan tersebut tercermin dalam menentukan satuan tugas yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan (nomenklatur) di Provinsi dan Kabupaten/kota, yakni ada yang seperti di Kementerian (nakertrans), ada yang digabung dengan beberapa fungsi lain dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah tingkat perputaran pegawai (*return turn over*) dari tingkat kepala dinas sampai dengan tingkat staf ke instansi lain sangat tinggi, sehingga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan bekerja para pegawai serta tingkat pemahaman akan ketenagakerjaan relatif berkurang. Hal ini semua akan berdampak pada pelayanan dan pelaksanaan kebijakan dan program ketenagakerjaan secara keseluruhan. Sementara permasalahan ketenagakerjaan sangatlah banyak, seperti masalah penganggur terbuka, setengah penganggur, penciptaan kesempatan kerja, pelatihan kerja, hubungan industrial, pengupahan dan lain sebagainya, menuntut penanganan secara serius dan cepat.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi pembina dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan saat ini belum mempunyai metodologi yang pas, yang dapat digunakan sebagai pendorong kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar melaksanakan seluruh layanan, kebijakan dan program kebijakan dan program ketenagakerjaan yang telah digariskan. Selain itu, Kementerian Nakertrans juga belum memiliki tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kebijakan dan program yang telah digariskan, sebagai dasar pemberian bantuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membutuhkan, serta kegunaan lainnya. Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirasa sangat perlu menyusun Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (*Manpower Development Index*).

Untuk mempermudah dalam penganalisaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan maka akan ditampilkan data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2011-2015 di Riau, hal ini untuk mengetahui sejauhmana pembanguan ketenagakerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

### **Analisis Kondisi dan Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau**

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau dapat dianalisis dari jumlah penduduk usia 15 tahun ketas menurut kegiatan utama yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sampai dengan jumlah pekerja tidak penuh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui web BPS.go.id disimpulkan bahwa masih tingginya tingkata pengangguran terbuka (*open unemployment*) dalam kurun waktu

lima tahun mencapai 6,72% artinya seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan dimana ini terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Umumnya para pencari kerja usia produktif ini bekerja disektor-sektor modern, untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan pencari kerja bersedia untuk menunggu beberapa waktu atau mencari kerja di daerah lain yang disektor modernnya telah berkembang. Hal ini yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka di Riau pada tahun 2015, sehingga pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar disbanding daerah perkotaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja perkotaan sehingga persaingan terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan pekerjaan.

**Tabel 8**  
**Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015**

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perencanaan Tenaga Kerja	11,58	11,68	11,89	12,50	12,58
2	Penduduk dan Tenaga Kerja	5,40	5,41	6,40	6,41	6,44
3	Kesempatan Kerja	10,72	10,75	9,72	12,72	12,75
4	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
5	Produktivitas Tenaga Kerja	1,79	1,88	1,98	1,99	1,99
6	Hubungan Industrial	1,42	1,45	1,49	1,50	1,55
7	Kondisi Lingkungan Kerja	8,42	8,45	8,48	8,86	8,98
8	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
9	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	8,83	8,88	8,98	8,99	8,99
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)		55,52	55,55	56,52	56,55	57,53

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2011-2015, diolah Pusdatinaker

Selama kurun waktu 2011-2015 jumlah tenaga kerja yang bekerja mengalami fluktuatif namun tidak mengalami perubahan yang drastis yakni berkisar diangka 62%, angka ini ditunjukkan dari persentase TPAK yang berfluktuatif namun cenderung turun artinya jumlah penduduk yang bekerja tidak mengalami perubahan yang significance karena pola partisipasi angkatan kerja yang ada di Riau cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Partisipasi dalam angkatan kerja cenderung berbeda antar kelompok umur, menurut status perkawinan dan perbedaan tingkat pendidikan.

Untuk menganalisis pembangunan ketenagakerjaan dapat dilihat dari produktivitas penduduk bekerja yang ada di Riau hal ini dimaksud untuk mengetahui sumbangan pendapatan bagi Riau yang salah satunya bersumber dari pendapatan masyarakat yang bekerja. Jika suatu daerah memiliki angka pengangguran yang cenderung tinggi maka jumlah pendapatan daerah akan cenderung turun. Selama kurun waktu 2011-2015 tingkat produktivitas penduduk cenderung meningkat namun tidak significance, hal ini disebabkan pada tahun 2013-2014 jumlah PDRB cenderung turun sedangkan jumlah penduduk yang bekerja meningkat namun tidak significance untuk semua sektor lapangan usaha, kecenderungan itu menumpuk pada beberapa sector saja seperti pertanian, perdagangan dan jasa yang memiliki angka diatas 15%. Artinya pembangunan ketenagakerjaan di Riau belum seimbang untuk semua sector. Pembangunan dan kondisi tenagakerja di Riau dapat juga dinalisis dari data jumlah pencari kerja yang terdaftar cenderung meningkat

namun pemenuhan tenaga kerja dan lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja, hal ini berarti pemerintah belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung para pencari kerja. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Riau belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena masih banyaknya para lulusan yang belum memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga terjadi *missmacht education by occupation* dan *missmacht education by income*. Hal ini yang harusnya jadi perhatian dari pemerintah provinsi dan juga perguruan tinggi yang akan mencetak para lulusan yang siap masuk ke pasar tenaga kerja.

### **Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau**

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahkan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu (*trigger*) agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. Perencanaan tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan dengan serius, konsisten dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat. Dengan perencanaan yang baik, penyediaan tenaga kerja akan lebih terarah terutama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik milik pemerintahan maupun swasta. Penyiapan tenaga kerja akan diusahakan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja formal.

Jika dilihat dari IPK Provinsi Riau selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan perubahan namun tidak begitu signifikan karena ada beberapa indikator dalam IPK tersebut masih dibawah rata-rata, namun secara keseluruhan IPK Riau tidaklah rendah namun belum mampu untuk mencapai angka standart yang ditetapkan yaitu 60 dan IPK Riau berada pada posisi no 11 untuk seluruh Provinsi karena indikator utama yang menjadi penyumbang terbesar indeks tersebut adalah Perencanaan Tenaga Kerja dengan Kesempatan Kerja. Indikator penduduk dan tenaga kerja memberikan sumbangan yang tidak terlalu besar padahal jika dilihat dari jumlah penduduk, Riau termasuk memiliki jumlah penduduk yang banyak akan tetapi hal ini terjadi karena masih selektifnya penduduk usia produktif dalam memilih pekerjaan salah satunya dari penghasilan yang akan diterima disamping itu masih banyaknya penduduk usia produktif yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang didukung semakin meningkatnya persentase jumlah pengangguran terbuka di Riau.

Dalam dunia kerja masih minimnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi baik sehingga dibutuhkan pelatihan bagi tenaga kerja, namun untuk pelatihan dan kompetensi kerja dinilai masih sangat kurang bagi para pekerja karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk para pekerja. Sedangkan produktivitas tenaga kerja juga masih rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya PDRB Riau begitu juga dengan masih rendahnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor-sektor utama.

Untuk hubungan industrial memberikan sumbangan yang sangat rendah terhadap pembangunan ketenagakerjaan, dimana hubungan industrial ini adalah kurangnya keberfihakan aturan terhadap tenaga kerja jika terpermasalahan antara perusahaan dengan para pekerja. Sedangkan untuk jaminan sosial tenaga kerja dan pengupahan saat ini dinilai sudah cukup mewakili kebutuhan dari para pekerja.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Riau dinilai masih belum mencapai target yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni pada angka 60, hal ini berarti kinerja pemerintah daerah Riau dalam bidang ketenagakerjaan masih kurang baik. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan khususnya pada indikator yang memiliki sumbangan terhadap pembangunan ketenagakerjaan yang masih rendah antara lain pelatihan dan kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial. Jika pembangunan ketenagakerjaan dapat ditingkatkan maka permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja dapat diatasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari pekerjaan di daerah lain yang tenatunya memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap daerah tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Kondisi ketenagakerjaan di Riau tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif seperti meningkatnya jumlah angkatan kerja mencapai 16,15% dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,72% sedangkan jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama memiliki sebaran yang tidak merata, persentase tertinggi adalah pada sector pertanian dan perdagangan hal ini dimungkinkan karena untuk memasuki lapangan pekerjaan terbuka bagi siapa saja dari berbagai latar belakang pendidikan.
2. Pembangunan ketenagakerjaan di Riau kurun waktu 2011-2015 mengalami perubahan namun tidak signifikan, karena hanya point-point tertentu saja yang mengalami pertumbuhan seperti system pengupahan yang sudah membaik begitu juga dengan tingkat produktivitas, namun dari jumlah kesempatan kerja masih dinilai kurang.
3. Untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan selama kurunwaktu 2011-2015 secara normative mengalami peningkatan sehingga berada pada posisi 11 namun indikator-indikator sebagai penyumbang dalam pembangunan ketenagakerjaan masih belum rata kenaikannya khususnya produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan pelatihan serta kompetensi kerja.

### **Saran**

1. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk jumlah pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja bagi penduduk sehingga pencari kerja tidak lagi mencari kerja di daerah lain sehingga berdampak terhadap penerimaan daerah itu sendiri.
2. Dibutuhkannya perhatian untuk pembangunan ketenagakerjaan yang ada di Riau secara merata sehingga tidak terjadi penumpukkan tenaga kerja pada sector-sektor tertentu, disamping itu untuk pencari kerja yang memiliki latar belakang pendidikan dibawah SMA diberikan pembekalan terhadap para pencari kerja tersebut.
3. Untuk Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dibutuhkan perhatian pemerintah daerah Riau karena ini menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah dibidang ketenagakerjaan. Khususnya pada indikator-indikator yang memberikan sumbangan yang sangat minim terhadap pembangunan ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvian Putri Utami, 2015. *Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Disnakertrans, 2012. Program Penyusunan Ketenagakerjaan
- Hasyim , 2003. *Konsep Ketenagakerjaan di Indonesia*, BPFE, Jakarta
- Hasibuan , 2002. *Perencanaan Tenaga Kerja*, Universitas Indonesia, BPFE, Jakarta
- Pusat Perencanaan Tenaga Kerja Sekretariat Jendral Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011-2014.
- Sudarsono, 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Sri Maryanti, 2013. Analisis Sektor Unggulan Terhadap Kinerja Ekonomi Dalam Menyerap Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Bisnis Volume 7 No 1 Maret 2015: 31-45*.
- Secha Alatas dan Rudi Bambang T, 2011. *Ketenagakerjaan dan Solusinya*, BPFE, Jakarta
- Syahrudin, 2002. *Fungsi dan Pengertian Tenaga Kerja*, BPFE, Jakarta
- Tulus Tambunan, 2011. "Upah Sistem Bagi Hasil dan Penerapan Tenaga Kerja" , *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 7 Nomor 1 : 45-54.
- UU No. 13 Tahun 2013 Undang-Undang Ketenagakerjaan
- WWW.BPS.go.id